

SKRIPSI
STRATEGI PERENCANAAN INFRASTRUKTUR DESA DALAM
MENUNJANG KAWASAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN DI
KECAMATAN MALUNDA KABUPATEN MAJENE

Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan mencapai derajat sarjana S1 pada
Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota



Disusun Oleh :

AINUN FATMIDIANI

D0320329

PROGRAM STUDI

TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA

FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS SULAWESI BARAT

MAJENE

2025

LEMBAR PENGESAHAN

**STRATEGI PERENCANAAN INFRASTRUKTUR DESA DALAM MENUNJANG
KAWASAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN DI KECAMATAN MALUNDA
KABUPATEN MAJENE**

SKRIPSI

Oleh :

**AINUN FATMIDIANI
NIM D0320329**

(Program Studi Sarjana Teknik Perencanaan Wilayah Dan Kota)

Universitas Sulawesi Barat

Skrripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana
Perencanaan Wilayah Dan Kota

17 Oktober 2025

Mengetahui :

Pembimbing I

Windy Septi Sintia, S.T., M.T
NIP . 199209012025212060

Pembimbing II

Zul Asriana S.T., M.Si
NIP . 198607052022032003

Koordinator Program Studi
Ade Mulawarman, S.T., M.Si
NIP. 198706212019031007

Dekan Fakultas Teknik
Prof. Dr. Ir. Hafsah Nirwana, M.T
NIP. 196404051990032002

HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ainun Fatmidiani

Nim : D0320513

Program Studi : Perencanaan Wilayah Dan Kota


Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah di ajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila pada kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan saya.

Majene, 17 Oktober 2025

Yang membuat pernyataan




Ainun Fatmidiani

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan strategi perencanaan infrastruktur desa dalam menunjang kawasan pertanian pangan berkelanjutan di Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene. Penelitian menggunakan metode campuran (*mixed methods*) yang menggabungkan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara dengan masyarakat petani dan instansi pemerintah, serta studi dokumentasi dari instansi terkait. Analisis data dilakukan dengan metode skoring untuk menilai kesesuaian infrastruktur desa terhadap standar teknis, analisis deskriptif kualitatif untuk mengidentifikasi persepsi masyarakat dan upaya pemerintah, serta analisis SWOT untuk merumuskan strategi perencanaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi infrastruktur desa di Kecamatan Malunda, seperti jalan usaha tani, irigasi, embung, dan gudang, masih belum sepenuhnya memenuhi standar teknis dan kebutuhan masyarakat petani. Pemerintah daerah telah melakukan beberapa upaya perbaikan melalui program pembangunan infrastruktur pedesaan, namun masih diperlukan perencanaan yang lebih terarah dan berkelanjutan. Strategi yang direkomendasikan meliputi peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur pertanian, penguatan koordinasi antarinstansi, dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan infrastruktur desa.

Kata kunci: *infrastruktur desa, pertanian berkelanjutan, perencanaan strategis, Kecamatan Malunda.*

ABSTRACT

This study aims to formulate a strategy for village infrastructure planning to support sustainable agricultural areas in Malunda District, Majene Regency. The research employs a mixed-methods approach combining quantitative and qualitative techniques. Data were collected through field observations, interviews with farmers and government agencies, and documentation studies from relevant institutions. Data analysis involved a scoring method to assess the suitability of village infrastructure with technical standards, qualitative descriptive analysis to identify community perceptions and government efforts, and SWOT analysis to formulate strategic planning. The results show that the existing village infrastructure in Malunda District—such as farm roads, irrigation systems, water reservoirs, and storage facilities—has not fully met technical standards or the needs of local farmers. The local government has undertaken several infrastructure improvement programs, but more focused and sustainable planning is still required. The recommended strategies include improving the quality and quantity of agricultural infrastructure, strengthening institutional coordination, and empowering communities in managing village infrastructure.

Keywords: *village infrastructure, sustainable agriculture, strategic planning, Malunda District*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang Undang Republik Indonesia nomor 6 tahun 2014 tentang desa menjelaskan bahwa Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

Pertanian adalah komponen utama yang menopang kehidupan perdesaan di Indonesia (Hariant, p. 2015). Pertanian juga merupakan sektor yang utama di negara berkembang yang memiliki peran atau kontribusi di sektor pertanian dalam pengembangan ekonomi suatu negara untuk menduduki posisi penting. Salah satu upaya dalam pengembangan lahan pertanian adalah dengan penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Penetapan LP2B merupakan upaya perlindungan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan dengan mempertahankan dan menambah luas lahan pertanian sehingga alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian dapat dikendalikan dan hasil produksi pertanian dapat maksimal dalam mendukung ketahanan, kemandirian, dan kedaulatan pangan nasional. Pada Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, salah satu kriteria penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan adalah ketersediaan infrastruktur dasar pertanian yang terdiri dari jaringan irigasi primer, sekunder dan tersier, jaringan drainase primer, sekunder dan tersier, akses jaringan jalan dan jembatan yang dapat digunakan sebagai sarana transportasi.

Pertanian dan infrastruktur memiliki keterkaitan dan memiliki hubungan yang erat dalam menjalankan aktivitas pertanian dan membangun sektor pertanian yang kuat. Tapi pada nyata nya sektor pertanian di daerah perdesaan belum bisa untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat yang ada di desas terbukti dengan tingginya jumlah penduduk miskin yang ada di daerah perdesaan (Jayatika, H. S, Reza, M, dan Witjaksono, A, 2023).

Menurut RTRW Kabupaten Majene, Kecamatan Malunda merupakan salah satu kawasan pertanian pangan berkelanjutan. Luas wilayah Kecamatan Malunda tercatat 187,65 km² atau sekitar 19,79 persen dari total luas Kabupaten Majene (Kabupaten Majene dalam angka, 2023). Kecamatan Malunda memiliki luas lahan padi sawah sebesar 353 Ha pada tahun 2021 dengan hasil produksi padi sawah sebanyak 2.007 Ton dan luas lahan padi ladang sebesar 879 Ha dengan jumlah hasil produksi 2.461 Ton (kabupaten Majene Dalam angka 2022) Sedangkan pada tahun 2022 luas lahan pertanian padi sawah mengalami peningkatan yaitu sebesar 690 Ha dengan hasil produksi padi sawah sebanyak 3.923 Ton, sedangkan luas lahan padi ladang mengalami penurunan sebesar 526 Ha dengan hasil produksi 1.473 Ton (Kabupaten Majene Dalam Angka, 2023), berdasarkan data hasil pertanian pada tahun 2022 sampai tahun 2023 hasil produksi padi sawah mengalami peningkatan sebanyak 1.916 Ton sedangkan hasil produksi padi ladang mengalami penurunan sebanyak 988 Ton, hal tersebut menunjukkan bahwa peningkatan hasil produksi terjadi karena adanya peningkatan luas lahan pertanian dan menurun ketika luas lahan pertanian berkurang, hal ini juga menunjukkan bahwa produktivitas lahan pertanian masih sangat kurang. Peningkatan produktivitas lahan pertanian dapat ditunjang dengan infrastruktur desa yang memadai namun hasil observasi lapangan dan wawancara kepada petani menunjukkan infrastruktur desa yang terdapat di Kecamatan Malunda belum memadai diantaranya jalan usaha tani yang sebagian besar masih menggunakan tanah yang menghambat akses dan distribusi hasil pertanian serta lahan padi sawah yang belum dilengkapi dengan sistem irigasi yang baik. Kondisi ini secara langsung berdampak pada produktivitas yang rendah, tingginya biaya produksi dan distribusi, serta kerugian pasca panen, yang pada akhirnya menghambat peningkatan kesejahteraan petani dan keberlanjutan sektor pertanian.

Berdasarkan uraian di atas maka penelitian ini bertujuan untuk merumuskan “Strategi perencanaan infrastruktur desa dalam menunjang kawasan pertanian pangan berkelanjutan di Kecamatan Malunda” dengan berlandaskan pada standar teknis dan kebutuhan masyarakat petani. Perencanaan ini diharapkan dapat menjadi panduan bagi pemerintah daerah dan pemangku kepentingan dalam upaya

meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur desa demi mendukung pengembangan kawasan pertanian pangan berkelanjutan sehingga lebih unggul dan berdaya saing.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana kesesuaian infrastruktur desa terhadap standar teknis dan kebutuhan masyarakat tani dalam menunjang pengembangan kawasan pertanian pangan berkelanjutan di Kecamatan Malunda?
2. Bagaimana upaya pemerintah dalam perencanaan infrastruktur desa yang menunjang pengembangan kawasan pertanian pangan berkelanjutan di Kecamatan Malunda?
3. Bagaimana strategi perencanaan infrastruktur desa dalam menunjang pengembangan kawasan pertanian pangan berkelanjutan di Kecamatan Malunda?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

1. Menganalisis kesesuaian infrastruktur desa terhadap standar teknis dan kebutuhan petani dalam menunjang pengembangan kawasan pertanian pangan berkelanjutan di Kecamatan Malunda
2. Mengidentifikasi upaya pemerintah dalam perencanaan infrastruktur desa yang menunjang pengembangan kawasan pertanian pangan berkelanjutan di Kecamatan Malunda
3. Merumuskan strategi perencanaan infrastruktur desa dalam menunjang pengembangan kawasan pertanian pangan berkelanjutan di Kecamatan Malunda

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Penelitian ini dapat menjadi bahan masukan dan informasi untuk pemerintah maupun swasta dalam hal perencanaan infrastruktur desa yang menunjang pengembangan Kawasan pertanian pangan berkelanjutan di kecamatan malunda di kabupaten majene.
2. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi salah satu bahan perbandingan bagi peneliti selanjutnya dengan topik yang sama.

1.5 Ruang Lingkup

1.5.1 Ruang Lingkup Wilayah

Kecamatan Malunda merupakan Salah satu kecamatan yang menjadi kawasan pertanian pangan berkelanjutan. di Kabupaten Majene. Luas wilayah Kecamatan Malunda tercatat 187,65 km² atau sekitar 19,79 persen dari total luas Kabupaten Majene. (BPS Kecamatan Malunda dalam angka 2023). Kecamatan Malunda memiliki luas kawasan pertanian pangan berkelanjutan yang besar dibandingkan dengan kecamatan lain yang menjadi kawasan pertanian pangan berkelanjutan.

1.5.2 Ruang Lingkup Materi

Adapun pembahasan penelitian ini adalah analisis kesesuaian infrastruktur desa dalam menunjang pengembangan kawasan pertanian pangan berkelanjutan di Kecamatan Malunda, identifikasi upaya pemerintah dalam perencanaan infrastruktur desa yang menunjang pengembangan Kawasan pertanian pangan berkelanjutan di kecamatan malunda serta rumusan strategi perencanaan infrastruktur desa dalam menunjang pengembangan kawasan pertanian pangan berkelanjutan di Kecamatan Malunda.

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penyelesaian dari penelitian ini, maka penulis menyusun sistematika sebagai berikut :

1. **Bab I Pendahuluan** berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup dan sistematika penulisan.

2. **Bab II Tinjauan Pustaka** berisi referensi terbaru, relevan, asli dan menguraikan teori umum yang mendasar bagi masalah yang diteliti, serta penelitian terdahulu dan kerangka pikir
3. **Bab III Metode Penelitian** berisi tentang waktu dan lokasi penelitian, jenis/pendekatan penelitian, jenis data, teknik pengumpulan data, teknik analisis, variabel penelitian, definisi operasional, dan alur penelitian
4. **Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan** memuat tentang gambaran umum, hasil penelitian dan pembahasannya, disertai dengan tabel, grafik dan bentuk lainnya.
5. **Bab V Kesimpulan dan Saran** berisi uraian singkat yang dijabarkan secara tepat untuk menjawab tujuan penelitian serta memuat berbagai usulan yang sebaiknya diperhatikan oleh peneliti lainnya.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian kesesuaian infrastruktur desa dengan standar menunjukkan bahwa infrastruktur desa di kecamatan malunda secara umum belum memadai dan belum memenuhi standar teknis, hal ini menunjukkan bahwa ketersediaan dan kualitas infrastruktur seperti jalan usaha tani, irigasi, embung, dan gudang belum sepenuhnya memenuhi standar teknis dan kebutuhan petani. Jalan tani di beberapa wilayah masih belum sesuai standar, bahkan sebagian besar belum dibeton sehingga menyulitkan mobilitas hasil pertanian, terutama pada musim hujan. Sistem irigasi juga belum merata, dengan beberapa wilayah yang belum memiliki jaringan irigasi yang memadai atau tidak dialiri air secara optimal. Selain itu, keberadaan embung dan gudang penyimpanan hasil pertanian masih sangat terbatas, sehingga petani kesulitan dalam menyimpan hasil panen maupun mengantisipasi kekurangan air saat musim kemarau.
2. Berdasarkan hasil analisis dari wawancara instansi pemerintah dan Masyarakat desa menunjukkan bahwa terdapat peluang dan ancaman dalam perencanaan infrastruktur desa yang menunjang Kawasan pertanian pangan berkelanjutan yaitu:
 - a. Telah terdapat kebijakan atau program dalam pengembangan infrastruktur yang menunjang kegiatan pertanian seperti bantuan pembangunan irigasi, pompa air, bibit dan pembimbingan kelompok tani
 - b. Telah terdapat program-program peningkatan infrastruktur yang menunjang kegiatan pertanian seperti pembangunan irigasi, rehabilitasi irigasi, dan pembangunan jalan usaha tani guna memaksimalkan kinerja infrastruktur dalam menunjang kegiatan pertanian

- c. Keterbatasan anggaran sehingga beberapa program peningkatan dan Pembangunan infrastruktur desa dalam menunjang kegiatan pertanian sulit direalisasikan
 - d. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam pemeliharaan infrastruktur yang telah tersedia
3. Berdasarkan hasil analisis SWOT, dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa strategi perencanaan infrastruktur desa dalam menunjang Kawasan pertanian pangan berkelanjutan di Kecamatan Malunda antara lain yaitu:
- a. Mengoptimalkan kinerja infrastruktur yang telah tersedia dari program pemerintah sehingga hasil produksi pertanian bisa lebih maksimal.
 - b. Program peningkatan infrastruktur dari pemerintah perlu memprioritaskan rehabilitasi untuk infrastruktur jalan usaha tani dan irigasi yang tidak sesuai dengan standar dan Pembangunan infrastruktur baru untuk desa yang belum memiliki jalan usaha tani dan irigasi.
 - c. Di perlukan penambahan program untuk Pembangunan embung dan Gudang dalam memenuhi kebutuhan penyimpanan air dan penyimpanan hasil produksi pertanian
 - d. Mengoptimalkan penggunaan anggaran untuk di fokuskan pada Pembangunan infrastruktur desa yang belum tersedia
 - e. Meningkatkan partisipasi Masyarakat dalam pemeliharaan infrastruktur yang telah tersedia melalui sosialisasi penyuluhan pertanian
 - f. Menyusun penggunaan anggaran dengan memprioritaskan Pembangunan infrastruktur yang belum tersedia dan secara bertahap merehabilitasi infrastruktur yang tidak sesuai dengan standar.
 - g. Melakukan edukasi tentang pentingnya keterlibatan Masyarakat dalam Pembangunan infrastruktur desa dan pemeliharaan infrastruktur desa yang terbangun dapat lebih terjaga melalui sosialisasi dan penyuluhan .

5.2 Saran

Hasil penelitian menunjukkan bahwa infrastruktur desa dalam menunjang Kawasan pertanian pangan berkelanjutan di Kecamatan Malunda belum memenuhi standar teknis dan kebutuhan petani sehingga menyebabkan permasalahan dalam peningkatan produktivitas lahan yang berdampak pada hasil produksi pertanian yang kurang optimal, oleh karena itu, diharapkan kepada pemerintah setempat untuk dapat mempertimbangkan atau menjadikan acuan hasil penelitian ini sebagai dasar untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur desa dalam menunjang Kawasan pertanian pangan berkelanjutan di Kecamatan Malunda

DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad, S. (2010). *Konservasi Tanah dan Air*. Edisi Revisi. Jakarta: IPB Press.
- Bashirah, A. (2018). Studi Pengembangan Agroindustri dalam Pembangunan Wilayah Kabupaten Majene (Studi Kasus Kecamatan Malunda) (Skripsi Sarjana, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Jurusan Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Sains dan Teknologi).
- Badan Standardisasi Nasional. (2007). *SNI 7331:2007 Ketentuan Gudang Komoditi Pertanian*.
- BPS Majene. (2024). Majene dalam Angka 2022.
- BPS Majene. (2024). Majene dalam Angka 2023.
- Creswell, John W, (2014). *Penelitian Kualitatif & Desain Riset*. Yogyakarta, Pustaka Pelajar
- Damopolii, M. V., Puluhulawa, F. U., & Abdussamad, Z. (2024). Implementasi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Terkait Konservasi Lahan Pertanian Di Kabupaten Bolaang Mongondow. *Depositi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum*, 2(1), 08-17.
- Diniati, W., Warouw, F., & Supardjo, S. (2023). Dampak Industri Kelapa Sawit Terhadap Lingkungan Perumahan dan Permukiman di Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah. *Sabua: Jurnal Lingkungan Binaan dan Arsitektur*, 12(1), 40-49.
- Fajrianti Ishak, dkk (2019). Evaluasi Ketersediaan Infrastruktur Perdesaan dalam Rangka Pengembangan Kawasan Pertanian di Kecamatan Oba Tengah. *Jurnal Spasial* Vol 6. No. 3
- Gai, A. M., Maulida, R. R., & Witjaksono, A. (2020). *Perencanaan dan Pengembangan Desa*. Kabupaten Malang: CV. Dream Litera Buana
- Hayani, Andi Syahratul. N.D. (2018) *Studi Dukungan Infrastruktur Pedesaan Dalam Rangka Pengembangan Kawasan Pertanian Di Kabupaten Gowa*.
- Hariato, n.d. (2015) *Peranan Pertanian Dalam Ekonomi Perdesaan*

- Harvick HQ. (2023). Wamentan Ir Harvick Hasnul Qolbi Hadiri Rakor Gratieks di Provinsi Sulawesi Barat. (Online): artikel.
- Indonesia, R. (2011). Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Lembaran Negara Tahun.
- John W. Creswell (2014), *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed* (Edisi III; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010),
- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. (2015). Pedoman perencanaan embung. Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian PUPR.
- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. 2020. Lampiran I Surat Edaran Menteri PUPR Nomor 04/SE/M/2020 tentang Pedoman Pembangunan Embung Kecil dan Bangunan Penampung Air Lainnya di Desa
- Kementerian Pertanian Republik Indonesia. (2012). *Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Kriteria dan Persyaratan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan*. Jakarta
- Muhammad Multazam, S. (2018). Analisis Ketersediaan Infrastruktur Kawasan Perdesaan Dalam Mendukung Pengembangan Kawasan Agropolitan Di Kabupaten Enrekang. Skripsi: UIN Alauddin Makassar.
- Mustabsir B. (2017). Evaluasi ketersediaan sarana dan prasarana pertanian dalam mendukung ketahanan pangan di Kecamatan Anreapi Kabupaten Polewali Mandar. Skripsi: UIN Alauddin Makassar
- Muta'ali, L. (2016). *Pengembangan Wilayah Perdesaan*. Yogyakarta: Badan Penerbit Fakultas Geografi, Universitas Gadjah Mada.
- PERATURAN MENTERI PERTANIAN 79/Permentan/OT.140/8/2013 Pedoman Kesesuaian Lahan Pada Komuditas Tanaman Pangan
- PERATURAN MENTERI PERTANIAN, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 Tentang pemerintahan daerah
- Peraturan Mentri PUPR No/07/SE/M/2018 Tenang Penyediaan Embung Kecil Dan Bangunan Penampungan Air Lainnya Di Desa

Peraturan Menteri PUPR NO/14/PRT/2015 Tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi

Peraturan Menteri PUPR/NO/27/PRT/2015 tentang Bendungan

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor 04/PRT/M/2014 Tahun 2014 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 47/PRT/M/2015 *tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur.*

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2006. Pengelolaan Irigasi

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 tahun 2016 tentang irigasi

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No 14/PRT/M/2015 tahun 2015 tentang kriteria dan penetapan status daerah irigasi

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No 27/PRT/M/2015 Tahun 2015 tentang bendungan

Peraturan Menteri Pertanian No 07/Permentan/Ot.140/2/2012 Pedoman Teknik Kriteria Dan Persyaratan Kawasan, Lahan, Dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Peraturan Menteri Republik Indonesia No 04 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Operasional Pengelolaan Dana Aloksi Khusus Fisik Pertanian

Pratiwi, NN. (2020). Kajian Tipologi Pedesaan Dalam Mengatasi Disparitas Wilayah Perbatasan Kecamatan Paloh. *Journal of Urban and Regional Planning* 1(1):31-39

Purwanto, H M.A., Ph.D.(Cand)dkk. (2019) pengaruh infrastruktur terhadap ketahanan pangan

RI, K. S. N. (2013). Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Lembaran Negara RI Tahun.

Republik Indonesia. (2014). Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 47/Permentan/RC.040/11/2014 *tentang Pengembangan Infrastruktur dan Sarana Pertanian.*

- Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
- Republik Indonesia. (2018). *Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 07/SE/M/2018 tentang Pedoman Pembangunan Embung Kecil dan Bangunan Penampung Air Lainnya di Desa*
- Republik Indonesia. (2019). *Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 05/Permentan/PL.020/2/2019 tentang Penyediaan dan Pengelolaan Lahan Pertanian*.
- Republik Indonesia. (2006). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi*
- Saragih, B. (2001). *Agribisnis Paradigma Baru Pembangunan Ekonomi Berbasis Pertanian*. Jakarta: PT Pustaka Binaman Pressindo.
- Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 07/SE/M/2018 tentang Pembangunan embun kecil dan penampungan air lainnya di desa.
- S. Wojowasito dan W.J.S Poerwodarminta. 1993. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka: Jakarta
- Soemarwoto, Otto. (2006). *Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan*. Jakarta: Djambatan
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)* (Bandung: Alfabeta, 2012)
- Syahratul, A. (2018). *Studi Dukungan Infrastruktur Pedesaan Dalam Rangka Pengembangan Kawasan Pertanian Di Kabupaten Gowa*. Skripsi: UIN Alauddin Makassar.
- Standar Nasional Indonesia (SNI) 7331:2007 tentang Ketentuan Gudang Komoditi Pertanian
- Tarigan A. (2003). *Rural-Urban Economic Linkage*. Jurnal Forum Inovasi Capacity Building and Good Governance. Jakarta
- Yayuk dan Mangku Purnomo. 2003. *Sosiologi Pedesaan*. Lappera Pustaka Utama: Yogyakarta
- Undang Undang Republik Indonesia nomor 6 tahun 2014 tentang Desa
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani

Zulfahri. (2017). Evaluasi Dukungan Infrastruktur Kawasan Agropolitan Di Kabupaten Bantaeng(Studi Kasus : Kecamatan Uluere Dan Kecamatan Sinoa). Skripsi:UIN Alauddin Makassar.